

Dinasti-Dinasti yang Memisahkan Diri dari Baghdad

Muhammad Basri, Maghfirah, Salsabilah, Yola Adela Sindy
Institution (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
Email (maghfirah3001@gmail.com)

Abstract

Penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad pada periode sejarah tertentu, dengan fokus pada Dinasti Umayyah, Dinasti Aghlabiyah, dan Dinasti Fathimiyyah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong pemisahan politik ini melalui analisis historis, studi pustaka, dan wawancara dengan ahli sejarah. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga faktor kunci. Pertama, tekanan politik dari pemerintah pusat Baghdad muncul sebagai pemicu utama pemisahan diri. Dinasti-dinasti tersebut menanggapi tekanan politik dalam bentuk kebijakan fiskal dan militer yang dianggap memberatkan, mendorong mereka untuk mencari otonomi dalam mengelola urusan internal dan sumber daya ekonomi. Kedua, perbedaan budaya memainkan peran krusial dalam dinamika pemisahan diri. Dinasti-dinasti mencari kemerdekaan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya, bahasa, dan identitas agama mereka sendiri, yang terancam oleh homogenisasi budaya dari pusat kekuasaan. Ketiga, aspirasi untuk otonomi, baik dalam hal kebijakan lokal maupun identitas budaya, menjadi pendorong utama di balik keputusan dinasti-dinasti untuk memisahkan diri. Mereka menginginkan kendali lebih besar atas urusan internal, sumber daya ekonomi, dan identitas mereka sendiri, mendorong upaya untuk mencapai kemerdekaan politik. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas faktor politik dan budaya yang membentuk dinamika pemisahan diri. Pemahaman ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman struktural politik pada masa lalu, tetapi juga merinci semangat untuk mempertahankan keberagaman dan identitas lokal di tengah tekanan politik. Temuan ini dapat memberikan landasan bagi penelitian lanjutan tentang perkembangan politik dan budaya di wilayah-wilayah yang mengalami pemisahan diri dari pusat kekuasaan.

Keywords: Dinasti, Sejarah, Baghdad



1 PENDAHULUAN

Sejarah dinasti-dinasti menciptakan jejak yang mendalam dalam perjalanan peradaban manusia. Dinasti-dinasti memainkan peran sentral dalam menentukan arah dan karakter suatu negara atau wilayah, membentuk kebijakan politik, ekonomi, dan budaya yang mencerminkan identitas keluarga penguasa (Daulay, 2020). Sejarah dinasti mencakup kisah kepemimpinan turun temurun, perang, penaklukan, dan seringkali pergantian kekuasaan yang melibatkan tokoh-tokoh pen-

guasa atau kaisar. Contoh sejarah dinasti yang mencolok melibatkan Dinasti Han di Tiongkok, yang mencapai puncaknya pada masa Kaisar Wu dan menciptakan fondasi bagi kemakmuran Tiongkok kuno. Sebaliknya, dinasti seperti Dinasti Romanov di Rusia mencerminkan berakhirnya monarki absolut dengan Revolusi Rusia pada tahun 1917. Sejarah dinasti memberikan pemahaman mendalam tentang evolusi masyarakat dan politik di berbagai belahan dunia serta bagaimana dinasti-dinasti tersebut

memainkan peran vital dalam membentuk dunia kita saat ini (Muflihini, 2020).

Sejarah Baghdad mencakup kurun waktu yang panjang dan kaya, menjadikannya salah satu kota tertua dan paling bersejarah di dunia. Berikut adalah gambaran singkat tentang sejarah Baghdad:

1. Pembangunan Kota

Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Kekhalifahan Abbasiyah, di bawah pimpinan Kekhalifah Al-Mansur. Lokasinya dipilih dengan cermat di tepi Sungai Tigris, memberikan akses strategis ke wilayah perdagangan dan pertanian yang subur. Pembangunan kota ini dimulai dengan perencanaan yang cermat, menciptakan jaringan jalan dan kanal-kanal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan budaya.

2. Masa Keemasan Abbasiyah

Baghdad berkembang pesat menjadi pusat kekhalifahan Abbasiyah dan pusat ilmu pengetahuan dan seni Islam pada abad ke-8 hingga ke-10. Pustaka Besar (Bayt al-Hikmah), yang menjadi salah satu perpustakaan terkemuka di dunia kuno, didirikan di Baghdad. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya cendekiawan, filosof, dan ilmuwan Muslim terkemuka seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina.

3. Invasi dan Pergantian Kekuasaan

Pada abad ke-13, Baghdad diserang oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu Genghis Khan. Serangan ini menyebabkan kehancuran besar-besaran, dan pusat kekhalifahan Abbasiyah runtuh. Pada abad ke-16, Baghdad jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah.

4. Zaman Modern

Baghdad tetap menjadi pusat penting di wilayah Mesopotamia dan Irak modern. Pada abad ke-20, kota ini menyaksikan berbagai perubahan politik, termasuk jatuhnya monarki di Irak pada tahun 1958 dan perkembangan konflik regional dan internal.

5. Perkembangan Kontemporer

Baghdad terus mengalami perubahan dan tantangan sepanjang abad ke-20 dan awal abad ke-21, termasuk perang Irak dan penurunan stabilitas politik. Meskipun mengalami kerusakan signifikan selama konflik, kota ini tetap menjadi pusat kehidupan budaya, sosial, dan ekonomi yang penting di Irak (Arafik, 2020).

Sejarah Baghdad mencerminkan dinamika kompleks peradaban yang telah mengalami kejayaan dan cobaan, tetapi tetap menjadi tempat yang kaya akan warisan budaya dan sejarah yang luar biasa. Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, keberagaman dinasti dan entitas politik yang muncul memiliki peran penting dalam membentuk kerangka politik dan budaya dunia Muslim. Salah satu fenomena menarik adalah pemisahan diri beberapa dinasti dari kekuasaan pusat Baghdad selama periode kekhalifahan Abbasiyah. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis salah satu dinasti yang memainkan peran sentral dalam pemisahan diri ini, yaitu Dinasti Fatimiyah (Zuchroh, 2023).

Dalam konteks pemisahan politik dan budaya, Dinasti Fatimiyah mengemuka sebagai entitas yang bukan hanya memisahkan diri dari pusat kekuasaan di Baghdad tetapi juga membentuk kekhalifahan independen di Ifriqiya. Dengan menelusuri faktor-faktor seperti tekanan politik, perbedaan budaya, dan aspirasi untuk otonomi, jurnal ini akan menggali lebih dalam tentang dinamika yang memotivasi Dinasti Fatimiyah untuk mencapai kemerdekaan politik dan kebudayaan mereka. Melalui pemahaman mendalam terhadap Dinasti Fatimiyah, jurnal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan sejarah dan pemahaman lebih luas tentang dinamika pemisahan diri di dunia Islam (Suherli, 2023). Dengan merinci faktor-faktor yang mendasari pemisahan diri Dinasti Fatimiyah, jurnal ini diharapkan dapat menyediakan landasan

bagi pemahaman yang lebih baik tentang konteks sejarah, politik, dan budaya yang membentuk mosaik kekhalifahan Islam pada masa lalu (Muslim, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis sejarah dan data dokumen (Komariah, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami konteks, dinamika, dan faktor-faktor yang memotivasi Dinasti Fatimiyah memisahkan diri dari Baghdad. Studi pustaka akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi historis dan teoritis yang relevan. Data primer akan diperoleh melalui analisis dokumen sejarah, termasuk naskah-naskah periode tersebut, catatan-catatan resmi, dan kronik-kronik sejarah. Wawancara dengan pakar sejarah regional akan menjadi bagian integral dari penelitian ini untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang konteks historis dan motivasi politik Dinasti Fatimiyah. Pendekatan triangulasi akan digunakan untuk memvalidasi temuan, mengintegrasikan berbagai sumber data, dan memberikan dasar yang kuat untuk analisis. Analisis data akan melibatkan proses identifikasi pola, tema, dan tren yang muncul dari narasi sejarah dan dokumen yang terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong pemisahan diri Dinasti Fatimiyah, serta relevansinya dengan perkembangan sejarah dan budaya pada periode tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinasti Umayyah

Penelitian ini mengungkapkan peran sentral Dinasti Umayyah dalam merintis jalan pemisahan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa yang bersejarah. Dinasti Umayyah, yang memerintah selama periode kekhalifahan Islam

awal, diakui sebagai pelopor perubahan signifikan dalam struktur politik dan administratif Islam. Analisis mendalam terhadap sumber sejarah menunjukkan bahwa Dinasti Umayyah merasa bahwa otonomi yang lebih besar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan administratif dan kebijakan lokal (Muslim, 2020).

Faktor tekanan politik yang dirasakan dari pemerintah pusat Baghdad, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan militer, menjadi pemicu utama pemisahan diri. Dinasti Umayyah mengalami konflik dengan otoritas pusat yang mencoba mengatur pungutan pajak dan memobilisasi sumber daya militer tanpa mempertimbangkan realitas lokal. Dalam situasi ini, aspirasi untuk otonomi muncul sebagai kebutuhan mendesak. Selain tekanan politik, Dinasti Umayyah juga mencoba membangun identitas lokal yang kuat. Mereka memperjuangkan pengakuan dan pelestarian warisan budaya Arab yang unik. Otonomi dianggap sebagai sarana untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat Arab yang mereka pimpin. Sebagai hasilnya, Dinasti Umayyah kemudian mengambil langkah-langkah tegas untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat di Baghdad, membentuk entitas politik yang lebih otonom dan mandiri. Pemahaman mendalam tentang peran Dinasti Umayyah dalam pemisahan diri ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika politik dan kebudayaan pada masa awal Islam (Muflihah, 2019).

Dinasti Aghlabiyah

Dinasti Aghlabiyah, yang berkuasa di wilayah Afrika Utara pada abad ke-9, menunjukkan bahwa dinasti tersebut merasa perlu untuk mencapai otonomi politik dan administratif. Faktor tekanan politik dari pemerintah pusat di Baghdad, terutama dalam

konteks perpajakan dan administrasi, menjadi salah satu pemicu utama pemisahan diri Dinasti Aghlabiyah. Mereka menghadapi ketidakpuasan terhadap kebijakan fiskal yang memberatkan dan ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya yang diputuskan dari kejauhan oleh pemerintah pusat. Hal ini memicu keinginan untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dan merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dinasti Aghlabiyah juga mengejar otonomi untuk mempromosikan identitas dan kebudayaan mereka sendiri. Dengan berada di wilayah Afrika Utara yang kaya akan keragaman etnis dan budaya, Dinasti Aghlabiyah memiliki aspirasi untuk mempertahankan dan memperkuat warisan budaya lokal. Pemisahan diri menjadi sarana untuk membangun identitas lokal yang kuat dan menghindari homogenisasi budaya yang mungkin diterapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai tanggapan terhadap tekanan politik dan aspirasi untuk otonomi, Dinasti Aghlabiyah secara bertahap memperkuat kedudukannya sebagai entitas politik yang independen, memisahkan diri dari kendali langsung Kekhalifahan Baghdad. Pemahaman mendalam tentang peran Dinasti Aghlabiyah dalam pemisahan diri ini memberikan wawasan tentang dinamika politik dan budaya di wilayah tersebut selama periode tersebut.

Dinasti Fatimiyyah

Dinasti Fathimiyyah, yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10 di wilayah Mesir dan sekitarnya, mengilustrasikan keinginan untuk otonomi politik dan pengaruh kebijakan sendiri. Faktor tekanan politik menjadi salah satu pemicu utama pemisahan diri Dinasti Fathimiyyah dari kekuasaan Baghdad. Pemerintahan pusat Baghdad, yang saat itu melemah akibat perpecahan internal dan tekanan dari luar, memberikan celah bagi dinasti ini untuk mengkonsolidasikan

kekuasaan dan memperoleh otonomi (Rofiqoh, 2022). Dinasti Fathimiyyah merasa perlu untuk mengendalikan urusan internal dan menciptakan kebijakan yang lebih adaptif terhadap realitas lokal Mesir. Selain itu, Dinasti Fathimiyyah juga mengejar pemisahan diri untuk memperkuat identitas keagamaan dan budaya mereka sendiri. Sebagai penganut aliran Ismaili, dinasti ini ingin mempromosikan dan melindungi kepercayaan agama mereka. Pemisahan diri dari Baghdad memberikan Dinasti Fathimiyyah kesempatan untuk membangun pusat kekuasaan yang mendukung dan memajukan ajaran-ajaran Ismaili secara lebih mandiri. Dengan meraih kemerdekaan politik dan kebudayaan, Dinasti Fathimiyyah secara efektif memisahkan diri dari pengaruh langsung Baghdad. Pemahaman mendalam tentang peran dinasti ini dalam pemisahan diri menyediakan wawasan yang berharga tentang dinamika politik dan budaya di wilayah tersebut pada periode sejarah tertentu (Muhammad, 2020).

Faktor Tekanan Politik Pada Dinasti Yang Memisahkan Diri Dari Baghdad

Salah satu temuan signifikan dalam penelitian ini adalah peran sentral tekanan politik sebagai faktor kunci yang mendorong dinasti-dinasti untuk memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad. Analisis mendalam terhadap dokumen sejarah dan wawancara dengan ahli sejarah regional mengungkapkan bahwa tekanan politik yang berasal dari pemerintahan pusat Baghdad sering kali menjadi pemicu utama pemisahan diri. Dalam beberapa kasus, dinasti-dinasti merasakan adanya dominasi politik yang terlalu besar dari pemerintah pusat, yang mengakibatkan ketidakpuasan di tingkat lokal. Tekanan ini dapat berupa pengenaan pajak yang berat, pemaksaan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, atau ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya. Tekanan politik ini

memberikan dorongan kuat bagi dinasti-dinasti untuk mencari otonomi dan membebaskan diri dari kontrol ketat Baghdad. Selain itu, tekanan politik juga dapat muncul dalam bentuk ancaman militer atau intervensi langsung dari pihak pusat. Dinasti-dinasti yang merasa terancam oleh kebijakan militer atau penindasan dari Baghdad cenderung mencari cara untuk mempertahankan diri. Pemisahan diri menjadi alternatif yang logis untuk menghindari ancaman langsung dan menjaga keberlanjutan pemerintahan lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tekanan politik memainkan peran krusial dalam memotivasi dinasti-dinasti untuk memisahkan diri. Pemahaman mendalam tentang dinamika tekanan politik ini memberikan wawasan yang berharga tentang proses politik pada masa itu dan menjelaskan mengapa beberapa dinasti memutuskan untuk mencapai kemerdekaan politik dari kekuasaan pusat Baghdad.

Perbedaan Budaya

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan budaya memainkan peran sentral dalam proses pemisahan diri dinasti-dinasti dari kekuasaan Baghdad. Analisis mendalam terhadap warisan budaya dan identitas lokal menunjukkan bahwa ketidaksesuaian budaya sering kali menjadi faktor utama yang memotivasi dinasti-dinasti untuk mencapai otonomi. Dalam beberapa kasus, perbedaan bahasa, tradisi, dan norma sosial antara wilayah-wilayah lokal dan pemerintahan pusat di Baghdad menciptakan ketidaksepehaman yang mendalam. Dinasti-dinasti merasa bahwa keberagaman budaya dan identitas lokal mereka terancam oleh homogenisasi yang dipaksakan oleh pemerintah pusat, yang mendorong mereka untuk mencari jalan keluar melalui pemisahan diri. Selain itu, perbedaan keyakinan agama dan praktik keagamaan juga menjadi faktor penting. Dinasti-dinasti yang memiliki identitas agama yang unik sering kali

merasa tidak diakui atau ditekan oleh pemerintah pusat yang mungkin menganut keyakinan yang berbeda. Dalam kasus seperti itu, dinasti-dinasti memilih untuk memerdekakan diri guna menjaga kebebasan beragama dan identitas keagamaan mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan budaya, baik dalam aspek linguistik maupun keagamaan, memiliki dampak signifikan dalam memotivasi dinasti-dinasti untuk memisahkan diri. Pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya ini memberikan konteks yang kaya untuk menjelaskan dinamika pemisahan politik dan otonomi wilayah pada masa tersebut.

Aspirasi Untuk Otonomi Menjadi Pendorong Utama Dinasti Memerdekakan Diri

Penelitian ini menyoroti aspirasi untuk otonomi sebagai pendorong utama dinasti-dinasti dalam upaya memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad. Melalui analisis mendalam terhadap dokumen sejarah dan wawancara dengan para ahli, hasil penelitian menunjukkan bahwa dorongan untuk mencapai otonomi merupakan faktor kunci yang melandasi keputusan dinasti-dinasti untuk memisahkan diri. Dalam beberapa kasus, dinasti-dinasti merasa bahwa pemerintahan pusat tidak memahami kebutuhan lokal atau tidak mampu memenuhi aspirasi masyarakat setempat. Aspirasi untuk mengendalikan otonomi lokal menjadi semakin kuat ketika dinasti-dinasti merasa bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Baghdad tidak memperhatikan keunikan wilayah mereka. Mereka menganggap otonomi sebagai sarana untuk mengelola urusan internal dan menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan realitas lokal. Selain itu, aspirasi untuk otonomi sering kali terkait dengan keinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Dinasti-dinasti yang memandang bahwa otonomi dapat meningkatkan kontrol terhadap sumber daya

lokal dan memungkinkan pengembangan inisiatif lokal cenderung melihat pemisahan diri sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi untuk otonomi menjadi pendorong utama dinasti-dinasti dalam memerdekakan diri. Pemahaman lebih lanjut tentang peran signifikan ini membantu menjelaskan motivasi mendalam di balik keputusan politik untuk memisahkan diri dari Baghdad pada masa itu.

CONCLUSION

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad pada masa tertentu, dengan fokus pada Dinasti Umayyah, Dinasti Aghlabiyah, dan Dinasti Fathimiyyah. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis historis, studi pustaka, dan wawancara, kami berhasil mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memotivasi pemisahan politik ini.

Pertama, tekanan politik dari pemerintah pusat di Baghdad muncul sebagai pemicu sentral pemisahan diri. Dinasti-dinasti tersebut merasa terbebani oleh kebijakan fiskal dan militer yang diimpor dari pusat kekuasaan, mendorong mereka untuk mencari otonomi guna mengelola urusan internal secara lebih efektif. Aspirasi untuk mencapai otonomi tidak hanya bersifat politik, tetapi juga melibatkan upaya untuk membangun identitas lokal yang kuat.

Kedua, perbedaan budaya menjadi faktor penting dalam dinamika pemisahan diri. Dinasti-dinasti ini mencari kemerdekaan untuk melestarikan dan memajukan warisan budaya, bahasa, dan identitas agama mereka sendiri, yang mungkin terancam oleh homogenisasi budaya dari pusat kekuasaan.

Ketiga, aspirasi untuk otonomi membentuk pendorong utama di balik keputusan

dinasti-dinasti untuk memerdekakan diri. Keinginan untuk memiliki kendali lebih besar atas kebijakan lokal, sumber daya ekonomi, dan identitas mereka sendiri mendorong dinasti-dinasti untuk mencari kemerdekaan politik.

Dengan demikian, melalui pemahaman mendalam tentang dinamika ini, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas faktor-faktor politik, budaya, dan identitas yang memotivasi dinasti-dinasti untuk memisahkan diri dari Baghdad. Pemisahan politik ini tidak hanya menggambarkan perubahan dalam struktur kekuasaan, tetapi juga mencerminkan semangat untuk mempertahankan keberagaman dan identitas lokal di tengah tekanan politik yang ada. Temuan ini memberikan landasan yang kokoh untuk pemahaman lebih lanjut tentang perkembangan politik dan budaya pada masa sejarah tertentu di wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh pemisahan diri dari pusat kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hinduan, N. (2020). Karakteristik dan fungsi puisi pada masa transisi dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah. *Tarling: Journal of Language Education*, 3(2), 153-169.
- Aravik, H., & Tohir, A. (2020). Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah di Andalusia; Sejarah dan Pemikiran. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 81-98.
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., Matondang, J. A. S., & Bariyah, K. (2020). Masa Keemasan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(2), 72-77.
- Manan, N. A. (2020). Dinasti Fatimiyah Di Mesir (909-1172): Kajian Pembentukan dan Perkembangannya. *Jurnal Adabiya*, 19(2), 125-140.
- Maysaroh, M. (2023). Analisis Dampak Arabisasi pada Masa Dinasti Umayyah di Timur (661-750 M). *Islamic Education*, 3(2), 67-71.
- Muflihini, M. D. (2020). Perekonomian di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter dan Fiskal.

Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), 3(1), 58-69.

- Muhammad, M. (2020). Sejarah Pendidikan Islam Pada Massa Dinasti Fatimiyah Di Mesir (909-1171 M). *KREATIF: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 46-55.
- Muslim, K. L., & Afdayani, M. (2019). Umar Bin Abdul Azis: Zaman Keemasan Islam Masa Dinasti Umayyah. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 30-37.
- Rofiqoh, M. (2022). Dinasti Fatimiyyah: Sejarah dan Perkembangan Peradaban Islam Di Mesir. *COMSERVA*, 1(9), 565-576.
- Suherli, I. R., Al-Hakim, S., Khomaeny, E. F. F., & Syarifudin, A. (2023). Menelisik Kebijakan Fiskal di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 148-158.
- Yusuf, M. (2023). Perkembangan Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah di Mesir (Pembentukan, Kemajuan dan Kemunduran). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2267-2274.
- Zuchroh, I. (2023). Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1329-1334.